

# Terjerat Utang Jangka Menengah

*Djakarta Lloyd digugat Globex Indonesia. BUMN bidang pelayaran itu dianggap lalai membayar cicilan surat pengakuan utang jangka menengah. Keuangan Djakarta Lloyd bermasalah?*

**M**ediasi selama 40 hari antara PT Globex Indonesia dan Djakarta Lloyd terlewat sudah. Kedua pihak ternyata tak juga bisa menyelesaikan persoalan utang-piutang terkait pembelian surat pengakuan utang jangka menengah (*medium term notes* --MTN). Djakarta Lloyd memiliki kewajiban membayar utang sebesar 500 juta yen atau setara dengan Rp 44,5 milyar.

Kewajiban itu timbul setelah PT Globex membeli MTN Djakarta Lloyd sebanyak lima lembar dari PT Danpac Sekuritas. Kini persoalan utang-piutang itu harus diselesaikan lewat jalur pengadilan. Sejak 26 November, perkara ini memasuki dua kali masa persidangan. "Belum ada jawaban memuaskan dari pihak Djakarta Lloyd," kata Roy Yunika, kuasa hukum Globex.

Persoalan yang membelit dua perusahaan itu berawal dari aksi korporasi

PT Djakarta Lloyd yang mengeluarkan 10 lembar MTN senilai 1 milyar yen pada 21 Desember 2006. Surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan itu ditandatangani dua direksi Djakarta Lloyd, Muhamad Muntaqa (presiden direktur) dan Dady Tjahjo Kuntjoro (direktur administrasi dan keuangan).

Dalam perjanjian itu terdapat klausul, Djakarta Lloyd berhak melakukan pembelian kembali 10 MTN itu dengan harga jual-beli sebesar 43% dari harga nominal, yaitu 430 juta yen atau senilai Rp 33,110 milyar. Hanya saja, perjanjian itu tidak berlaku jika Djakarta Lloyd tak memenuhi syarat melakukan pembayaran selama 24 bulan, dengan waktu jatuh tempo setiap bulannya tanggal 21 dan pembayaran dimulai pada 21 Februari 2007.

Jika lalai, Djakarta Lloyd tak hanya kehilangan hak membeli kembali, melainkan juga memiliki kewajiban membayar seluruh nilai 10 lembar MTN itu seharga 1 milyar yen. Awalnya, perjanjian itu berjalan mulus. Namun, ketika memasuki bulan ketiga masa pembayaran, tiba-tiba PT Djakarta Lloyd tidak mampu lagi mengangsur pembayaran MTN itu ke Danpac Sekuritas.

Dengan begitu, sesuai dengan

ANTARA/JESSICA WUYSANG

Salah satu kapal Djakarta Lloyd





hanya digunakan untuk memanaskan air. Lalu dikembangkan untuk energi listrik dengan daya sampai 75 watts tiap modul PV (*photovoltaic*).

Selain itu, untuk mengatasi limbah cair rumah tangga, dibangun Sewage Treatment Plant. Pusat pengolahan limbah ini terletak di sebelah selatan kota, di antara lahan pertanian dan hutan. Lahan sepanjang 700 meter dan lebar 90 meter dibuat berjenjang sesuai dengan enam proses penitrasi limbah cair. Selain tiga tabung penampung, ada dua kolam yang di atasnya ditanami alang-alang yang akarnya dipenuhi mikrobakteri untuk mengurangi tingkat polusi air.

Air yang sudah melalui proses penghilangan polutan lalu disalurkan ke hutan. Pusat pengolahan limbah ini menangani 70 rumah tangga dengan kemampuan pengolahan limbah cair sebanyak 100 liter per rumah per hari.

Proyek selanjutnya adalah pembangunan pembangkit energi tenaga biomassa dan pembangkit energi tenaga angin mulai tahun 1997. Dua proyek ini selesai dalam waktu dua tahun. "Selain itu, ada pembangunan kembali pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang selama ini dikelola biara St. Marienthal," kata Mathias.

St. Marienthal sudah memanfaatkan tenaga air berdaya 3,2 MW sejak tahun 1914 untuk mengoperasikan pabrik pengolahan kayu dan memenuhi kebutuhan listrik di dalam kawasan biara. Saat jaringan listrik lokal masuk tahun 1967, PLTA ini berhenti beroperasi.

PLTA ini direnovasi dan kembali digunakan pada tahun 2000. Sebuah turbin Kaplan, yang menghasilkan tenaga 104 KW (dengan kecepatan 145 rpm) dipasang. Kecepatan arus airnya 6,5 meter per detik dari ketinggian 2 meter. Kaplan melengkapi keberadaan turbin lama, Francis. Yang menghasilkan tenaga 14,7 kW dengan suplai air 1,2 meter per detik di ketinggian 2,17 meter.

Pengoperasian kembali PLTA St. Marienthal ini menandai berakhirnya fase pertama EMOS. Menurut Mathias, dana yang sudah dikeluarkan selama fase pembangunan teknik ini mencapai 30 juta euro (Rp 450 milyar, dengan kurs saat ini 1 euro=Rp 15.000). Pemerintah Federal Jerman menanggung hampir setengah dari total dana, pemerintah Saxony menanggung sekitar seperempatnya. Sisa seperempat bagian ditanggung pemerintah kota Ostritz dan pihak-pihak lain.

Program EMOS ini, menurut Mathias, membuat nama Ostritz terkenal di seluruh Jerman. Sebab, EMOS mem-



Sungai Neisse

buat Ostritz menerima banyak penghargaan. Salah satunya, gelar sebagai kota pertama di dunia yang berhasil memenuhi seluruh kebutuhan energinya dari paduan sumber energi terbarukan.

Toh, peraihan gelar ini tak berarti EMOS berhenti. Sebaliknya, pada tahun 2004, muncul inisiatif dari warga Ostritz, untuk mengembangkan EMOS. Mereka ingin EMOS tak hanya fokus pada proyek teknis, melainkan juga bisa mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

Maklum, banyak proyek energi baru di Ostritz, namun tak banyak menyerap tenaga kerja. Misalnya pembangkit energi biomassa Heizkraftwerkes hanya dioperasikan oleh lima orang. Total pekerja yang bisa diserap hanya sekitar 150 orang. Alhasil, tak banyak berpengaruh mengurangi tingkat pengangguran yang mencapai 20% di Ostritz.

Inisiatif ini akhirnya berujung pada pelaksanaan EMOS tahap kedua, dimulai tahun 2006. Kali ini tiga bidang di atas yang jadi fokus. Targetnya, dalam waktu dua tahun, sembilan program untuk mengatasi masalah bisa terlaksana.

Di fase kedua ini, St. Marienthal memegang peran krusial. Para biarawati St. Marienthal mulai membuka diri dengan

menjadikan St. Marienthal sebagai lokasi *eco-tourism*. Ada sederet daya tarik yang mereka promosikan ke para wisatawan. Mulai dari kompleks biara yang dipenuhi bangunan bersejarah berusia delapan abad, peninjauan pembangkit listrik tenaga air warisan seabad silam, hingga wisata bersepeda menjelajahi kebun anggur dan daerah pertanian milik biara.

St. Marienthal juga membuat aneka program untuk menarik wisatawan yang dikaitkan dengan penjagaan lingkungan. Seperti membuat restoran dengan menu khusus yang diolah dari hasil panen tanaman organik milik biara, membuka tempat penginapan di lingkungan biara, hingga membuat bazar produk dan makanan lokal.

Hasilnya mulai tampak. Ostritz dan St. Marienthal dikunjungi lebih dari 30.000 orang tahun lalu. Meningkatkan hampir dua kali lipat dari setahun sebelumnya. Peningkatan turis ini menambah lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian Ostritz. "Kami berharap kondisi ini bisa membuat warga Ostritz yang dulu bermigrasi kembali ke sini," kata Mathias. ■

ASTARI YANUARTI (OSTRITZ)







ABDUL MALIK MSN

Juan Felix Tampubolon

klausul dalam perjanjian, pihak Djakarta Lloyd kehilangan haknya untuk melakukan pembelian kembali dan harus membayar seluruh utangnya kepada Danpac Sekuritas. Untuk mengurangi kerugian, Danpac menjual lima lembar MTN tersebut kepada PT Globex Indonesia pada 1 Juli 2008. Harganya Rp 44,5 milyar. "Dengan demikian, sebagian kewajiban Djakarta Lloyd beralih ke Globex Indonesia," kata Yunika.

Namun, seperti terjadi sebelumnya, Djakarta Lloyd juga tak memenuhi kewajibannya kepada Globex. Karena itu, sesuai dengan perjanjian, PT Globex pun berhak menagih pembayaran penuh atas lima lembar MTN tersebut. Karena tagihan itu tak juga digubris, pada 14 Agustus 2008 pihak Globex mengajukan somasi kepada Djakarta Lloyd agar dalam waktu tujuh hari setelah surat diterima, pihak Djakarta Lloyd memenuhi kewajibannya.

Lantaran tak juga mendapat tanggapan, pada 25 Agustus 2008 pihak Globex melayangkan gugatan kepada Djakarta Lloyd. Karena Djakarta Lloyd adalah bandan usaha milik negara (BUMN), Globex dalam gugatannya memasukkan Presiden RI dan Menteri Negara BUMN sebagai pihak yang digugat. Pihak Globex meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Djakarta Lloyd telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar utang sebesar Rp 44,5 milyar kepada Globex.

Selain itu, Globex juga minta penetapan sita jaminan atas Gedung



WISNU PRABOWO

Sofyan Djalil

Djakarta Lloyd dan tujuh kapal milik Djakarta Lloyd. Sidang pertama pun digelar pada 15 Oktober 2008. Majelis hakim memberikan jangka waktu 40 hari bagi kedua pihak untuk melakukan mediasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Hakim M. Ely Mariana sebagai mediator.

Proses mediasi ini gagal, lantaran pihak Djakarta Lloyd dianggap tak memberikan jawaban memuaskan kepada Globex. Pihak Globex menawarkan kepada Djakarta Lloyd agar membayar Rp 5 milyar sebagai uang muka. Kekurangannya bisa diangsur selama empat kali, dengan membayar Rp 9,875 milyar setiap bulan.

Tim pengacara PT Djakarta Lloyd yang dipimpin Juan Felix Tampubolon selalu beralasan butuh waktu untuk mempelajari draf gugatan tersebut. Selain itu, adanya pergantian direksi PT Djakarta Lloyd sedikit mempengaruhi kerja manajemen, sehingga diperlukan pula waktu untuk melakukan konsolidasi. Akhirnya proses mediasi menemui jalan buntu dan harus diselesaikan lewat persidangan.

Roy Yunika heran, mengapa Djakarta Lloyd begitu *ngotot* tak juga mau membayar kewajibannya. Kemungkinan hal itu terjadi lantaran kondisi keuangan PT Djakarta Lloyd memprihatinkan. Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, beberapa waktu lalu pernah mengatakan, PT Jakarta Lloyd mungkin akan menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Djakarta Lloyd, kata Sofyan, mengalami kesulitan keuangan akibat

akumulasi kerugian dan utang kepada pihak ketiga dalam jumlah besar.

Meski begitu, menurut Sofyan Djalil, perusahaan-perusahaan BUMN tetap harus membayar kewajibannya, termasuk utang-utangnya. Sebab, dalam kondisi krisis keuangan global, pemerintah memang diminta memberikan ketenangan berusaha dan jaminan hukum bagi para pelaku bisnis. Komitmen pemerintah itu juga harus ditunjukkan kepada BUMN yang dinilai lalai memenuhi kewajibannya kepada perusahaan swasta.

Soal kasus gugatan Globex kepada Djakarta Lloyd itu, Sofyan Djalil akan menyerahkannya kepada mekanisme pengadilan. "Itu masalah *business to business*. Jika digugat, silakan, akan dilayani Djakarta Lloyd sebagaimana seharusnya," begitu isi pesan singkat yang dikirim Sofyan Djalil kepada Sukmono Fajar Turido dari GATRA. Sofyan menyatakan, jalur hukum akan menjadi solusi terbaik penyelesaian kasus ini.

Pakar hukum bisnis Erman Radjagukguk menyarankan agar kedua pihak mengambil jalan damai. Pertimbangannya, penyelesaian melalui persidangan akan makan waktu yang mungkin sangat lama. Biayanya juga akan sangat banyak. "Secara bisnis, tidak efisien jika menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Mahal dan menyita waktu," kata Erman kepada Putri Mira Gayatri dari GATRA. Jalur pengadilan bertele-tele karena nanti ada proses banding dan kasasi, lalu peninjauan kembali.

Karena Djakarta Lloyd adalah BUMN, kata Erman, keputusan apakah utang itu dibayar atau tidak bergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan itu. Jika AD/ART Djakarta Lloyd mengharuskan penerbitan MTN harus seizin dewan komisaris--dalam hal ini Menteri Negara BUMN--bila MTN yang ditandatangani Muhammad Muntaqa dan Dady Tjahjo Kuntjoro itu tidak ada persetujuan dewan komisaris, kemungkinan Djakarta Lloyd akan berketil.

Erman mengatakan, kedua pihak masih punya jalan keluar, yakni melakukan negosiasi ulang. Meski sudah masuk jalur pengadilan, dalam proses persidangan, upaya perdamaian masih bisa dilakukan di setiap tingkatan. "Kalau sampai proses ini bertahun-tahun, kan malah akan rugi banyak. Menang jadi abu, kalah jadi arang," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. ■

M. AGUNG RIYADI



# Jenderal Polisi Terserempet Judi

*Kasus judi togel berskala besar di Riau menyeret puluhan perwira dan bintang polisi yang bertugas maupun pernah bertugas di sana. Tiga nama jenderal bintang dua yang pernah menjadi Kapolda Riau ikut disebut-sebut.*

**A**roma tak sedap bernuansa judi menerpa jajaran kepolisian. Sejumlah anggota korps baju cokelat itu terindikasi terlibat atau setidaknya membiarkan perjudian berskala besar di Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang lebih bikin heboh, enam perwira tinggi disebut pula tersangkut, bersama-sama dengan puluhan perwira pertama dan menengah serta sejumlah bintang.

Nama perwira tinggi polisi bintang dua dan bintang satu memang tidak disebutkan secara eksplisit. Ketika mengungkapkan temuan mengejutkan itu, Senin pekan lalu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani, hanya menyebutnya sebagai tiga mantan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau

